

BAB V

KESIMPULAN

Diadopsinya *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021-2025)* yang diikuti dengan KTT ASEAN ke-34 mengenai *Bangkok Declaration on Combating Marine Debris* di Bangkok pada tahun 2019 menjadi salah satu upaya Thailand dan negara-negara ASEAN lainnya untuk memerangi isu sampah laut yang hadir di kawasan regional Asia Tenggara. Thailand sebagai tuan rumah saat disahkannya deklarasi tersebut juga memiliki peran penting untuk mengambil tindakan untuk mengurangi banyaknya sampah di lautan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan hambatan untuk mencapai *goal* atau tujuan utama dari deklarasi tersebut. Berdasarkan *Teori Institutional Analysis and Development Framework*, tantangan serta hambatan yang dihadapi Thailand terkait isu ini yaitu tergolong menjadi tiga poin, di antaranya: (1) *Fragmented Governance*, (2) *Limited Stakeholder Participation*, dan (3) *Inadequate Resource Allocation*.

Beberapa faktor penghambat dalam mencapai *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* ialah, tantangan dari pemerintah terkait kurangnya kebijakan atau aturan hukum yang tegas terkait sampah laut, masifnya penggunaan plastik di kalangan masyarakat serta kurangnya kesadaran dari tiap individu, pemakaian plastik sebagai bahan baku oleh pelaku bisnis dikarenakan harga yang murah serta fleksibel, meningkatnya pembelanjaan *online* dan sampah medis akibat situasi pandemi COVID-19, sistem pengelolaan limbah sampah yang kurang baik, ketiadaan fasilitas serta dana yang diperlukan untuk pengelolaan sampah di Thailand, dan lainnya.